

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah P..2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdul Gafar Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ruslan. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amalia S. Nabilya R. Izzat. *et.al.* 2024. *Pengaturan Tata Kelola Taksi Daring di Indonesia: Siapa Yang Harus Pegang Kendali*. Yogyakarta: Insitute of International Studies.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makasaar. Identias Universitas Hasanuddin.
- Avdul Kholiq A. dan Abul Haris Suryo N. 2019. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tatanegara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bagir Manan. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bayu D. Anggono. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Charles Simabura. 2022. *Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*. Depok: Rajawali Pers.
- Fitri Wahyuni.2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama
- Hans Kelsen. 2018. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- . 2019. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

- HAW. Widjaja. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hendra Riofita. 2015. *Perilaku Organisasi*. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir.
- HR. Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Press.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Irwansyah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- J.J.H Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. (alih bahasa Arief Sidharta). Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at. 2022. *Seri Pemikir Hukum: Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Jimly Asshidiqie. 2020. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers.
- Kotler Philip dan Gary Armstrong. 2008. *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Keduabelas Jilid Satu*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniadin dan Imam Machali. 2016. *Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: PT. Ar-Ruzz Media
- Maftuh Effendi. 2017. *Dinamika Yurisdiksi Peradilan Administrasi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Maria Farida Indrati S. 2020. *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis. Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ni' Matul Huda. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.
- , 2005. *Otonomi Daerah Filosofi. Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Peter M. Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. *et.al.* 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romi Librayanto. 2008. *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar. Pusat Kajian Politik. Demokrasi. dan Perubahan Sosial.
- S. Pradjudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- S.H. Sarundajang. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sadu Wisistiono. *et.al.* 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokusmedia.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soedikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudaryono dan Natangsa S. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Tjondoro Tirtamulia. 2016. *Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Universitas Surabaya

#### **SKRIPSI, TESIS, dan DISERTASI**

- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I- PELITA IV)*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hendra Kurnia Putra. 2020. *Pengaturan Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta.

Muhammad Fariz Alhazmi. 2019. Problematika Pengaturan Transportasi Online Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Di Yogyakarta. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

#### **JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA**

Antoinus Gemilar. 2020. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Studi Kasus Pada Taksi Online di Kota Yogyakarta). *Dinamika Hukum* Volume 10 Nomor 3.

Ardilafiza. Beni Kurnia I. Amancik. dan Annisa S. 2022. *Kedudukan dan Karakteristik Peraturan Menteri dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 3.

Asni Mufnizar dan Budi Hartanto Susilo. 2022. Kajian Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Sebagai Pengguna dan Pengemudi Terhadap Rencana Penyesuaian Tarif Angkutan Taksi Online pada Grab. Gojek dan Maxim. *Jurnal teknik Sipil* Volume 18 Nomor 2.

Danel Aditia Situngkir. 2018. *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. *Soumatra Law Review*. Vol. 1. No. 1.

Iza Rumesten RS. 2014. *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*. *Jurnal Konstitusi* Volume 11 Nomor 4

Juwita P Pratama. Lita Tyesta ALW. et.al. 2022. *Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Konstitusi*. Volume 19. Nomor 4.

Saldi Isra. 2006. *Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Pemerintahan Aceh*. Makalah. diselenggarakan oleh Forum LSM Aceh bekerjasama dengan Forbes BRA. di Banda Aceh.

Sofyan Hadi. "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)". *Jurnal Ilmu Hukum DIH*. Vol. 9. No. 18. Februari 2013

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *NEGARA HUKUM*: Vol. 9. No. 1. Juni 2018.

#### **SUMBER INTERNET**

Anonim. 2017. *Mengenal dan Memahami PM 108 Tahun 2017*. <https://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017>. diakses pada 07/02/2024

- Anonim. 2015. *Surat Edaran Krikil Dalam Perundang-Undangan* <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan-lt54b1f62361f81/> . diakses pada 4 April 2024.
- Bilal Dewansyah. 2014. *Undang-Undang Dicabut. Apakah Peraturan Pelaksanaannya masih Berlaku.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/undang-undang-dicabut--apakah-peraturan-pelaksanaannya-masih-berlaku-lt5330cceb87f6/>. diakses pada 05/04/2024
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. 2017. *Mengenal dan Memahami PM 108 Tahun 2017.* <https://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017> . diakses pada 24/11/2023
- Daon001. 2018. *Transportasi Online Kini Tak Lagi Memiliki Payung Hukum.* [https://www.kominfo.go.id/content/detail/14380/transportasi-online-kini-tak-lagi-miliki-payung-hukum/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/14380/transportasi-online-kini-tak-lagi-miliki-payung-hukum/0/sorotan_media). Diakses pada 01/02/2024
- Garry F. Sitolingga. 2022. *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-Undangan.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>. diakses pada 04 April 2022
- Renata C. Auli. 2022. *Catat! Ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium Hukum yang Perlu Dipahami.* [https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7-adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7-adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e#_ftn2). diakses pada 07/12/2023
- Shidarta. 2022. *Hak dan Kewajiban.* <https://business-law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban/>. diakses pada 26 desember 2023.
- Sovia Hasanah. 2016. *Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>. diakses pada 22/05/2023.
- Valerie Augustine Budianto. 2022. *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>. diakses pada 07/12/2023.
- Vidya Prahassacitta. 2019. *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis.* <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>. diakses pada 4 /12/2022.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi Kementerian Negara *jo* Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 3244/AJ.801/DJPD/2017

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2559/XII/Tahun 2022